BASELINE: JURNAL MAHASISWA MAGISTER MANAJEMEN
Vol. 3, No. 1, January 2026, 153-164

PENGARUH PERAN PEMERINTAHAN DESA DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN PETANI DAN PETERNAK DI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Rahmad Rosadi[1], Fahmi Oemar [2*]

[1,2*] Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan terhadap perekonomian petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel sensus. Responden penelitian berjumlah 74 orang yang berasal dari kelompok petani dan peternak yang terlibat dalam program ketahanan pangan di Kecamatan Siak Hulu pada tahun 2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dan uji ANOVA untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak dengan nilai signifikansi 0,008. Program ketahanan pangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Secara simultan, kedua variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,879 menunjukkan bahwa 87,9% variasi perekonomian dapat dijelaskan oleh peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan, sedangkan 12,1% lainnya berkaitan dengan faktor di luar model penelitian. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan pemerintahan desa dan pelaksanaan program ketahanan pangan dalam memperkuat aktivitas ekonomi serta keberlanjutan usaha petani dan peternak.

KATA KUNCI

Peran Pemerintahan Desa; Program Ketahanan Pangan; Perekonomian; Petani; Peternak

Pendahuluan

Sektor pertanian dan peternakan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Kedua sektor tersebut tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi rumah tangga, tetapi juga berkontribusi terhadap penyediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal. Bagi sebagian masyarakat desa, kegiatan pertanian dan peternakan merupakan sumber mata pencaharian yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja keluarga, serta potensi ekonomi yang tersedia di lingkungan setempat. Oleh karena itu, keberlangsungan kedua sektor tersebut berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, mengelola usaha, memperoleh akses pasar, dan mempertahankan pendapatan. Namun, aktivitas ekonomi petani dan peternak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, akses terhadap teknologi, ketidakstabilan harga komoditas, biaya produksi, serta keterbatasan sarana pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu dalam menjalankan usaha, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan karena berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan pangan. Food and Agriculture Organization (FAO, 2018) menjelaskan bahwa ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pasokan. Keempat dimensi tersebut menunjukkan

* **Fahmi Oemar.** Email: fahmioemar@unilak.ac.id

ISSN 3089-6029 (online ISSN)
© 2026

bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya produksi pangan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan demikian, penguatan sektor pertanian dan peternakan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi sekaligus upaya menjaga keberlanjutan sistem pangan di tingkat lokal.

Pencapaian ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah desa yang memiliki kedekatan langsung dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan desa mempunyai posisi strategis dalam mengidentifikasi potensi lokal, menyusun prioritas pembangunan, memfasilitasi kelompok masyarakat, serta mengoordinasikan pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, penyuluhan, fasilitasi akses pasar, serta pengembangan kapasitas petani dan peternak. Saragih dan Siahaan (2020) membahas keterkaitan kebijakan pemerintah desa dengan produktivitas pertanian, sedangkan Kusnadi (2020) menekankan peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintahan desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

Peran pemerintahan desa dalam pengembangan perekonomian petani dan peternak dapat dilihat melalui beberapa aspek, antara lain kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa perlu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan menjadi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dalam sektor pertanian dan peternakan, dukungan tersebut dapat berupa fasilitasi bantuan bibit, pupuk, pakan ternak, peralatan produksi, pelatihan pengelolaan usaha, dan penyampaian informasi mengenai peluang pasar. Selain itu, pemerintah desa juga dapat berperan dalam membangun hubungan antara kelompok tani dan ternak dengan instansi teknis, lembaga keuangan, maupun pelaku usaha lainnya. Dengan adanya dukungan kelembagaan tersebut, petani dan peternak diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan nilai ekonomi hasil produksinya.

Keterlibatan pemerintah desa menjadi semakin penting ketika program ketahanan pangan dilaksanakan sebagai bagian dari agenda pembangunan desa. Program tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Hidayati dan Pratama (2021) menjelaskan pentingnya implementasi program ketahanan pangan melalui berbagai strategi yang mendukung produksi dan penguatan sistem pangan. Program ketahanan pangan dapat mencakup peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi komoditas, pengembangan teknologi pertanian dan peternakan, serta penguatan sistem distribusi. Pelaksanaan program juga membutuhkan keterlibatan kelompok masyarakat agar kegiatan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi setempat. Santoso dan Prasetya (2021) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan agar manfaat program dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Program ketahanan pangan yang dilaksanakan secara tepat berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi kelompok petani dan peternak. Dukungan terhadap ketersediaan sarana produksi dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha, sedangkan pendampingan teknis dapat mendorong penerapan metode produksi yang lebih efektif. Selain itu, penguatan distribusi dan pemasaran dapat membuka peluang bagi petani dan peternak untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas. Febriansyah, Nurchaini, dan Fathoni (2018) mengkaji peran program

desa mandiri pangan dalam meningkatkan pendapatan usaha tani. Akmal dan Solichin (2023) juga membahas keterkaitan program ketahanan pangan desa dengan perekonomian masyarakat desa. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar bahwa program ketahanan pangan perlu dinilai bukan hanya berdasarkan terlaksananya kegiatan, tetapi juga berdasarkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.

Meskipun demikian, keberadaan program ketahanan pangan belum tentu secara otomatis memberikan hasil ekonomi yang optimal. Keberhasilannya bergantung pada ketepatan sasaran, kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan penerima, kualitas pendampingan, ketersediaan sarana pendukung, dan keberlanjutan pelaksanaan program. Program yang hanya berorientasi pada penyaluran bantuan tanpa memperhatikan kemampuan penerima dalam mengelola usaha dapat menghasilkan manfaat yang terbatas. Demikian pula, bantuan sarana produksi yang tidak disertai akses pemasaran dan penguatan kapasitas usaha belum tentu mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Burrahmad (2018) menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga petani juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan modal sosial yang dimiliki masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan program ketahanan pangan perlu memperhatikan karakteristik kelompok sasaran dan kondisi ekonomi yang dihadapi petani maupun peternak.

Perekonomian petani dan peternak sebagai variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan kelompok usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertanian maupun peternakan. Perekonomian tersebut dapat tercermin melalui produktivitas usaha, pendapatan, kemampuan mengembangkan kegiatan produksi, serta keberlanjutan usaha rumah tangga. Pada sektor pertanian, kondisi ekonomi dipengaruhi oleh luas dan pemanfaatan lahan, ketersediaan sarana produksi, kondisi cuaca, harga hasil panen, dan akses pemasaran. Sementara itu, pada sektor peternakan, faktor yang memengaruhi kegiatan usaha meliputi ketersediaan pakan, kesehatan ternak, biaya pemeliharaan, teknologi, dan akses terhadap pasar. Haryanto (2020) menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat terbentuk melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlangsung dalam lingkungan sosial ekonomi tertentu. Dengan demikian, pengembangan ekonomi petani dan peternak memerlukan pendekatan yang memperhatikan kondisi usaha secara menyeluruh, bukan hanya peningkatan jumlah produksi.

Dalam konteks pembangunan pedesaan, peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan memiliki keterkaitan yang saling mendukung. Pemerintahan desa berperan dalam mengarahkan kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta memfasilitasi penyelenggaraan program. Sementara itu, program ketahanan pangan menjadi salah satu instrumen untuk menerjemahkan dukungan tersebut ke dalam kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok petani dan peternak. Apabila pemerintahan desa mampu menjalankan fungsi fasilitasi dan koordinasi secara efektif, pelaksanaan program berpeluang menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Sebaliknya, program yang dirancang tanpa memperhatikan potensi lokal dan kondisi masyarakat dapat menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Hubungan kedua faktor tersebut perlu dikaji karena peningkatan perekonomian petani dan peternak tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program, tetapi juga oleh kualitas peran kelembagaan yang mengelola dan mendukung pelaksanaannya.

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi pada sektor pertanian dan peternakan. Potensi wilayah yang disajikan dalam naskah penelitian menunjukkan adanya kegiatan perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Pada sektor perkebunan, komoditas kelapa sawit dan karet menjadi bagian dari pemanfaatan lahan masyarakat. Sementara itu, aktivitas peternakan mencakup pemeliharaan sapi, kerbau, kambing, ayam, dan jenis ternak lainnya. Keragaman kegiatan ekonomi tersebut menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi sumber daya tidak selalu berbanding

lurus dengan peningkatan kondisi ekonomi kelompok usaha. Petani dan peternak tetap menghadapi kebutuhan terhadap dukungan sarana produksi, teknologi, pendampingan, penguatan kapasitas, dan akses pemasaran agar aktivitas usaha dapat berkembang secara lebih optimal.

Dalam konteks tersebut, program ketahanan pangan di Kecamatan Siak Hulu menjadi salah satu upaya yang relevan untuk mendukung kegiatan ekonomi kelompok petani dan peternak. Pelaksanaan program di tingkat lokal perlu memperhatikan karakteristik usaha yang dijalankan masyarakat, baik pada sektor pertanian maupun peternakan. Kelompok petani membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, sedangkan kelompok peternak memerlukan dukungan yang berkaitan dengan pemeliharaan ternak, ketersediaan pakan, kesehatan ternak, dan pengembangan usaha. Perbedaan karakteristik tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan kelompok sasaran dan mengarahkan program secara tepat. Dengan demikian, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan secara administratif, tetapi juga oleh kesesuaian program dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Meskipun potensi pertanian dan peternakan di Kecamatan Siak Hulu cukup beragam, masih terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan berhubungan dengan kondisi perekonomian kelompok petani dan peternak. Evaluasi tersebut penting karena keberadaan program tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh kelompok penerima memperoleh manfaat ekonomi yang sama. Perbedaan jenis usaha, pengalaman, kemampuan pengelolaan, serta kondisi akses terhadap pasar dapat memengaruhi manfaat yang diterima oleh masing-masing kelompok. Selain itu, efektivitas peran pemerintahan desa dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan dukungan kebijakan juga perlu dilihat berdasarkan persepsi kelompok yang terlibat dalam program. Oleh karena itu, diperlukan bukti empiris untuk mengetahui hubungan antara peran pemerintahan desa, pelaksanaan program ketahanan pangan, dan perekonomian kelompok petani serta peternak.

Penelitian terdahulu telah membahas peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal, serta pelaksanaan program ketahanan pangan dalam mendukung perekonomian masyarakat. Kusnadi (2020) menyoroti peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, sedangkan Febriansyah et al. (2018) mengkaji kontribusi program desa mandiri pangan terhadap pendapatan usaha tani. Andriani, Fitri, dan Wahyuni (2024) membahas hubungan implementasi program dana desa untuk ketahanan pangan dengan persepsi masyarakat mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Sementara itu, Akmal dan Solichin (2023) mengkaji pengaruh program ketahanan pangan desa terhadap perekonomian masyarakat. Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa kebijakan dan program pembangunan desa memiliki relevansi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pengaruh peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan secara bersama-sama terhadap perekonomian kelompok petani dan peternak dalam konteks Kecamatan Siak Hulu masih perlu dianalisis secara empiris.

Kesenjangan kajian dalam penelitian ini terletak pada perlunya menguji kedua faktor tersebut dalam satu model penelitian dengan menempatkan perekonomian petani dan peternak sebagai variabel terikat. Peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi keduanya dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Peran pemerintahan desa menggambarkan dukungan kelembagaan, kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi, sedangkan program ketahanan pangan menggambarkan bentuk intervensi yang diarahkan untuk memperkuat kegiatan produksi dan sistem pangan lokal. Dengan menguji pengaruh keduanya secara parsial maupun simultan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai kontribusi tata kelola

pemerintahan desa dan pelaksanaan program terhadap kondisi ekonomi kelompok petani dan peternak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran pemerintahan desa terhadap perekonomian petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu, menganalisis pengaruh program ketahanan pangan terhadap perekonomian petani dan peternak, serta menguji pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian manajemen sektor publik dan pembangunan ekonomi pedesaan, khususnya mengenai peran pemerintahan desa dalam mendukung program ketahanan pangan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok petani dan peternak, memperkuat pendampingan usaha, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi lokal untuk mendorong keberlanjutan perekonomian masyarakat pedesaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *descriptive explanatory survey* untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan pengawasan komite terhadap kinerja guru sekolah dasar di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi penelitian adalah seluruh guru sekolah dasar di Kecamatan Singingi Hilir yang berjumlah 344 orang. Penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh 77 guru sebagai responden penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup dengan skala Likert dan wawancara langsung kepada pihak terkait. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah, pengawasan komite, dan kinerja guru, sedangkan wawancara digunakan sebagai informasi pendukung. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait sebagai pelengkap informasi penelitian.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23.0. Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan pengawasan komite terhadap kinerja guru, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dan uji F untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara bersama-sama. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menjelaskan variasi kinerja guru. Pengambilan keputusan didasarkan pada tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Hasil

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 74 responden yang merupakan anggota kelompok ketahanan pangan di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Responden terdiri atas 36 orang petani (48,6%) dan 38 orang peternak (51,4%). Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 38 orang (51,4%), sedangkan perempuan berjumlah 36 orang (48,6%).

Berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 31–40 tahun, yaitu sebanyak 31 orang (41,9%). Selanjutnya, responden berusia 41–50 tahun berjumlah 23 orang (31,1%), sedangkan responden yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 20 orang (27,0%). Dari segi pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki pendidikan SMA sebanyak 35 orang (47,3%), diikuti pendidikan SD sebanyak 18 orang (24,3%), SMP sebanyak 12 orang (16,2%), dan responden yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sebanyak 9 orang (12,2%).

Berdasarkan lama menjalankan usaha sebagai petani atau peternak, sebanyak 38 responden (51,4%) telah menjalankan usaha kurang dari lima tahun. Responden dengan pengalaman usaha 5–10 tahun berjumlah 13 orang (17,6%), pengalaman 11–15 tahun sebanyak 11 orang (14,9%), dan pengalaman 16–20 tahun sebanyak 8 orang (10,8%). Sementara itu, responden yang memiliki pengalaman usaha lebih dari 20 tahun berjumlah 4 orang (5,4%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian memiliki latar belakang yang beragam berdasarkan jenis usaha, usia, pendidikan, dan pengalaman dalam menjalankan kegiatan pertanian maupun peternakan.

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan setiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel peran pemerintahan desa, program ketahanan pangan, dan perekonomian petani dan peternak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* pada variabel peran pemerintahan desa (X1) untuk lima butir pernyataan masing-masing sebesar 0,458; 0,439; 0,383; 0,521; dan 0,470. Pada variabel program ketahanan pangan (X2), nilai masing-masing butir pernyataan adalah 0,365; 0,360; 0,472; 0,493; dan 0,582. Sementara itu, pada variabel perekonomian (Y), nilai *Corrected Item-Total Correlation* masing-masing butir pernyataan adalah 0,391; 0,472; 0,317; 0,423; dan 0,365.

Selanjutnya, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa variabel peran pemerintahan desa memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,671 dengan lima butir pernyataan. Variabel program ketahanan pangan juga memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,671 dengan lima butir pernyataan, sedangkan variabel perekonomian memiliki nilai sebesar 0,610 dengan lima butir pernyataan. Hasil tersebut menunjukkan nilai konsistensi internal instrumen untuk masing-masing variabel sebagaimana diperoleh dari pengolahan data penelitian.

3. Hasil Uji Asumsi Statistik

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh jumlah data sebanyak 74 responden, dengan nilai statistik pengujian sebesar 0,076 dan nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga residual pada model regresi dinyatakan berdistribusi normal.

Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang terlalu tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel peran pemerintahan desa (X1) dan program ketahanan pangan (X2) masing-masing memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,714 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,401. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen tidak mengalami gejala multikolinearitas karena nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, kedua variabel independen dapat digunakan secara bersamaan dalam model regresi linear berganda.

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh peran pemerintahan desa (X1) dan program ketahanan pangan (X2) terhadap perekonomian petani dan peternak (Y), baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai konstanta sebesar 1,707, koefisien regresi peran pemerintahan desa sebesar 0,117, dan koefisien regresi program ketahanan pangan sebesar 0,803. Dengan demikian, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah:

[Y = 1{,}707 + 0{,}117X_1 + 0{,}803X_2]

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 1,707 merupakan nilai perekonomian petani dan peternak ketika variabel peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan dianggap bernilai nol. Koefisien regresi peran pemerintahan desa sebesar 0,117 menunjukkan hubungan positif antara peran pemerintahan desa dan perekonomian petani dan peternak. Artinya, peningkatan peran pemerintahan desa diikuti oleh peningkatan nilai perekonomian sebesar 0,117 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sementara itu, koefisien regresi program ketahanan pangan sebesar 0,803 menunjukkan hubungan positif antara program ketahanan pangan dan perekonomian petani dan peternak, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel peran pemerintahan desa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,117, nilai *t-hitung* sebesar 2,743, dan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, peran pemerintahan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu. Dengan demikian, peningkatan peran pemerintahan desa berkaitan dengan peningkatan perekonomian kelompok petani dan peternak.

Pada variabel program ketahanan pangan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,803, nilai *t-hitung* sebesar 17,597, dan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program ketahanan pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak. Koefisien regresi yang lebih besar pada variabel program ketahanan pangan menunjukkan bahwa variabel ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan perekonomian dibandingkan peran pemerintahan desa dalam model penelitian.

5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan secara bersama-sama terhadap perekonomian petani dan peternak. Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai *F-hitung* sebesar 258,317 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan kondisi perekonomian responden. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat menjelaskan hubungan antara peran pemerintahan desa, program ketahanan pangan, dan perekonomian petani dan peternak.

6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan dalam menjelaskan variasi perekonomian petani dan peternak. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,938, nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,879, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,876, dan nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 0,768.

Nilai R Square sebesar 0,879 menunjukkan bahwa variabel peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan mampu menjelaskan 87,9% variasi perekonomian petani dan peternak. Sementara itu, sebesar 12,1% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Nilai korelasi (R) sebesar 0,938 juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua variabel independen secara bersama-sama dengan perekonomian petani dan peternak. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan merupakan dua variabel yang berkaitan erat dengan

kondisi perekonomian kelompok petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Diskusi

1. Pengaruh Peran Pemerintahan Desa terhadap Perekonomian Petani dan Peternak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan pemerintahan desa memiliki keterkaitan dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian dan peternakan. Pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal.

Peran pemerintahan desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, fasilitasi kegiatan produktif, penyediaan pelayanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sugeng dan Riyanto (2019) juga menjelaskan bahwa pemerintahan desa memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui implementasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintahan desa menjadi penting karena petani dan peternak membutuhkan dukungan yang dapat membantu keberlangsungan kegiatan usaha mereka. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi, pendampingan, penyuluhan, bantuan sarana produksi, serta fasilitasi akses terhadap pasar. Subroto (2020) menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sementara itu, Pratama (2022) menekankan pentingnya perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan Dana Desa dalam mendukung program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Soetomo (2021) yang menyatakan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian desa sangat menentukan kesejahteraan masyarakat, terutama pada wilayah yang sebagian masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Kebijakan pemerintah desa yang tepat dapat membantu masyarakat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Mulyani dan Supriyadi (2022) juga menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi desa dipengaruhi oleh kebijakan dan intervensi pemerintah desa, khususnya melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan bagi masyarakat.

Selain itu, Prasetyo dan Santosa (2023) mengemukakan bahwa pendampingan yang konsisten serta pemanfaatan dana desa dapat membantu kelompok tani dan ternak mengembangkan usaha secara lebih optimal. Kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah desa berpotensi mendukung peningkatan pendapatan dan pengelolaan usaha masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pemerintahan desa memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian kelompok petani dan peternak melalui kebijakan dan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, pengaruh positif pemerintahan desa perlu didukung oleh pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dukungan pemerintah desa tidak cukup hanya diwujudkan dalam penyusunan program, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan petani dan peternak, pemerataan manfaat, serta evaluasi pelaksanaan program. Faktor eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas,

biaya produksi, dan kondisi pasar juga dapat memengaruhi hasil kegiatan usaha masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan kelompok tani dan peternak agar kebijakan yang disusun dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

2. Pengaruh Program Ketahanan Pangan terhadap Perekonomian Petani dan Peternak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ketahanan pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Temuan ini memperlihatkan bahwa program ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung keberlangsungan usaha pertanian dan peternakan. Program ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Ketahanan pangan mencakup empat aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Food and Agriculture Organization (FAO, 2018) menjelaskan bahwa keempat aspek tersebut merupakan unsur penting dalam mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di Indonesia, ketahanan pangan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program ketahanan pangan perlu memperhatikan tidak hanya ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan perekonomian petani dan peternak, program ketahanan pangan dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan produksi, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan usaha. Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan memungkinkan masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi untuk dipasarkan. Hal ini sejalan dengan Sudarsono (2022) yang menjelaskan bahwa program ketahanan pangan yang dilaksanakan pemerintah desa atau lembaga terkait dapat memperkuat ekonomi pedesaan melalui peningkatan produksi, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, serta penguatan distribusi produk pertanian dan peternakan.

Anggraeni dan Purwanto (2023) juga menunjukkan bahwa program ketahanan pangan yang dirancang secara strategis, termasuk melalui penyuluhan mengenai teknik pertanian dan peternakan yang efisien serta peningkatan akses pasar, dapat mendukung peningkatan produksi dan pendapatan kelompok tani dan ternak. Dukungan berupa pelatihan, subsidi, dan akses terhadap teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok sasaran.

Selanjutnya, Wijaya dan Prasetyo (2022) menjelaskan bahwa ketahanan pangan yang kuat dapat meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga petani dan peternak. Kemampuan memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri serta menghasilkan surplus untuk dijual dapat membantu memperkuat kondisi ekonomi rumah tangga. Program ketahanan pangan yang berbasis komunitas juga dapat mendorong kerja sama antaranggota kelompok tani dan peternak sehingga mendukung pengembangan usaha secara kolektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut. Pengaruh positif program ketahanan pangan menunjukkan bahwa penguatan kegiatan ketahanan pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Program yang dilaksanakan secara terarah dapat membantu kelompok tani dan peternak meningkatkan kapasitas usaha, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta memperluas peluang pemasaran produk. Dengan demikian, manfaat program ketahanan pangan dapat dirasakan

tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi, tetapi juga dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Namun, keberlanjutan program ketahanan pangan tetap memerlukan dukungan berbagai faktor. Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok, ketersediaan pendanaan, pemanfaatan teknologi, infrastruktur pendukung, dan akses pasar perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar program yang dijalankan tetap relevan dengan perubahan kebutuhan masyarakat serta kondisi sosial dan ekonomi di tingkat desa. Partisipasi aktif petani dan peternak dalam perencanaan maupun pelaksanaan program menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa manfaat kegiatan dapat dirasakan secara lebih luas.

3. Pengaruh Peran Pemerintahan Desa dan Program Ketahanan Pangan terhadap Perekonomian Petani dan Peternak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Temuan ini mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian kelompok petani dan peternak tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program ketahanan pangan, tetapi juga dengan dukungan kelembagaan dan kebijakan pemerintahan desa. Kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan kelompok produktif.

Secara teoritis, perekonomian masyarakat desa merupakan bagian dari aktivitas ekonomi lokal yang melibatkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Haryanto (2020) menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam suatu wilayah, termasuk sektor pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Dalam konteks petani dan peternak, perkembangan ekonomi berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengelola usaha, meningkatkan produksi, memperoleh pendapatan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, dukungan pemerintah desa dan program ketahanan pangan dapat menjadi unsur penting dalam memperkuat aktivitas ekonomi tersebut.

Handayani (2021) menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian dan peternakan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyuluhan, akses terhadap teknologi pertanian, pelatihan, dan subsidi untuk meningkatkan produktivitas. Sementara itu, Sutrisno dan Hidayat (2020) menekankan bahwa ketahanan pangan berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa karena mencakup ketersediaan pangan, aksesibilitas, dan stabilitas harga yang mendukung keberlanjutan pendapatan masyarakat.

Hubungan antara peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan juga didukung oleh penelitian Nasution dan Fauzi (2022), yang menjelaskan pentingnya kemampuan pemerintah desa dalam merancang program sesuai kebutuhan lokal. Kebijakan yang memperhatikan potensi sumber daya alam dapat membantu meningkatkan produksi pertanian dan peternakan serta mendukung pendapatan kelompok usaha. Selanjutnya, Sukmawati dan Halim (2023) menunjukkan bahwa program ketahanan pangan yang didukung kebijakan pemerintah desa dapat membantu meningkatkan daya saing produk pertanian dan peternakan melalui peningkatan kapasitas produksi dan pengelolaan hasil usaha.

Herianto dan Widiastuti (2021) juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan program ketahanan pangan dalam menciptakan perekonomian pedesaan yang lebih stabil. Program yang efektif dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi serta memperluas akses masyarakat terhadap teknologi dan pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa

keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan dukungan pemerintahan desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi.

Dalam penelitian ini, hubungan kedua variabel tersebut tercermin dari hasil pengujian simultan yang menunjukkan bahwa peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak. Selain itu, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan sebagian besar variasi perekonomian responden. Temuan ini memperlihatkan pentingnya mengintegrasikan kebijakan pembangunan desa dengan program ketahanan pangan agar kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Meskipun kedua variabel memiliki kontribusi yang besar dalam model penelitian, masih terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi perekonomian petani dan peternak. Faktor tersebut antara lain perubahan harga pangan dan komoditas pertanian, kondisi iklim, biaya produksi, ketersediaan sarana usaha, teknologi, serta kondisi pasar. Oleh karena itu, peningkatan perekonomian petani dan peternak memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan memperhatikan aspek kebijakan, keberlanjutan program, dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian petani dan peternak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Peran pemerintahan desa menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui kebijakan, fasilitasi, pendampingan, dan pemberdayaan kelompok tani dan peternak. Sementara itu, program ketahanan pangan berperan dalam mendukung produktivitas, keberlanjutan usaha, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi pangan lokal. Secara bersama-sama, kedua faktor tersebut menunjukkan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan kondisi perekonomian petani dan peternak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat desa memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah desa dan pelaksanaan program ketahanan pangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program, meningkatkan pendampingan serta akses petani dan peternak terhadap sarana produksi, teknologi, pelatihan, dan pasar. Partisipasi aktif kelompok tani dan peternak juga perlu ditingkatkan agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada responden kelompok ketahanan pangan di Kecamatan Siak Hulu dengan variabel peran pemerintahan desa dan program ketahanan pangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor lain yang berpotensi memengaruhi perekonomian petani dan peternak, seperti akses permodalan, teknologi produksi, harga komoditas, dan akses pasar. Kajian pada wilayah yang lebih luas juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan kebijakan pemerintahan desa, program ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Referensi

Akmal, S., & Solichin, S. (2023). Pengaruh program ketahanan pangan desa terhadap perekonomian masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara, 2*(1), 23–28. https://doi.org/10.56135/jabnus.v2i1.84

Andriani, I., Fitri, Y., & Wahyuni, I. (2024). Hubungan implementasi program dana desa untuk ketahanan pangan dengan persepsi masyarakat mengenai tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis, 27*(1), 22–35.

Burrahmad, M. (2018). Pengaruh modal sosial terhadap ketahanan pangan rumah tangga petani di Desa Sentosa Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad, 3*(2), 497–507. https://doi.org/10.24198/agricore.v3i2.19542

Febriansyah, E., Nurchaini, D. S., & Fathoni, Z. (2018). Pengaruh program desa mandiri pangan dalam meningkatkan pendapatan usahatani. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis, 21*(1), 4. https://doi.org/10.22437/jiseb.v21i1.5093

Food and Agriculture Organization. (2018). *Food security and nutrition: Building a global narrative*. FAO.

Haryanto, E. (2020). *Dasar-dasar ekonomi masyarakat*. Alfabeta.

Hidayati, S., & Pratama, B. (2021). Implementasi program ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Agraria, 15*(3), 215–228.

Kusnadi, D. (2020). Peran pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Desa, 9*(1), 55–66.

Pratama, W. (2022). *Peran pemerintah desa dalam pembangunan daerah*. Alfabeta.

Saragih, R., & Siahaan, A. (2020). Dampak kebijakan pemerintah desa terhadap produktivitas pertanian. *Agritropika, 15*(2), 98–109.

Sugeng, A., & Riyanto, B. (2019). *Peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa*. Gramedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.